

Disdukcapil Kabupaten Trenggalek Butuh Anggaran untuk Cetak KTP

Agus Riyanto - TRENGGALEK.OPINIPUBLIK.ID

Apr 30, 2022 - 17:12



Salah satu pelayanan di Disdukcapil Kabupaten Trenggalek

Trenggalek - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Trenggalek sedikit mengalami kendala dalam cetak KTP. Pasalnya, kekurangan anggaran untuk membeli ribbon yang digunakan untuk mencetak KTP.

Pelaksana tugas (Plt) Disdukcapil, Edif Hanuyan Siswanto mengatakan, jika

Disdukcapil merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang bekerja untuk penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dan tahun kemarin mendapatkan suntikan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sebesar Rp 1,8 miliar.

Namun, untuk sekarang pemberian DAK dari pusat ada beberapa kriteria, antara lain menyangkut prestasi dari instansi yang dimaksud. Disdukcapil Kabupaten Trenggalek tidak mendapatkannya untuk DAK tahun 2022.

" Awalnya kami memperkirakan akan dapat DAK. Namun dari informasi terakhir ternyata tak mendapatkannya. Apalagi, adanya temuan dari BPK, " ucapnya, Jumat (15/4/2022).

Edif menuturkan, dalam APBD Disdukcapil sebagian Rp 8,5 miliar. Dengan asumsi juga digunakan untuk belanja pegawai. Sehingga, sisa anggarannya sebesar Rp 1,8 miliar.

Pria yang pernah menjabat sebagai Camat Panggul ini menyampaikan, pihaknya telah berkirim surat kepada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Namun, hingga sekarang belum ada respon.

" Yang jelas kami sudah berkirim surat ke Bakeuda dan TAPD, namun belum dijawab. Mungkin masih diestimasi. Intinya, kami berharap - harap cemas, " imbuhnya.

Dia menyebut, salah satu anggaran yang paling dibutuhkan adalah untuk pembelian ribbon dan memerlukan anggaran Rp 650 juta. Dengan asumsi satu ribbon mampu mencetak 500 KTP senilai Rp 3,6 juta. Sedangkan untuk percetakan KIA, sekitar Rp 1,6 juta per 216 kartu.

" Kami juga punya kegiatan Dukcapil keliling yang banyak menyerap anggaran untuk operasionalnya, " ungkapnya.

Selain itu, dia menyampaikan, jika anggaran tersebut tidak segera ada maka akan ada dampak yang cukup signifikan, yakni Disdukcapil tidak bisa mencetak KTP.

" Padahal pada tahun 2024 semua warga harus sudah memiliki KTP, " tutupnya (ags).